

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah aspek krusial yang memerlukan perhatian serius dari negara-negara, terutama yang sedang dalam tahap perkembangan, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap dinamika ekonomi global. Pola yang terjadi di negara-negara berkembang saat ini menunjukkan bahwa laju pembangunan ekonomi saat ini masih belum memadai secara efektif menciptakan lapangan kerja seiring dengan laju pertumbuhan populasi. Konsep pembangunan ekonomi melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kemajuan ekonomi suatu negara, termasuk dalam hal inovasi model ekonomi yang digunakan. Pendekatan dalam Peningkatan pendapatan secara signifikan bukan satu-satunya fokus pembangunan ekonomi, tetapi juga pada modernisasi sektor-sektor ekonomi, seperti transformasi sektor pertanian dari yang bersifat tradisional serta permasalahan penting lainnya seperti percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan.

Pembangunan ekonomi adalah proses dimana industri swasta bermitra dengan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan menghasilkan peluang kerja baru di berbagai sektor, dengan tujuan mendorong perkembangan aktivitas ekonomi. Selain itu, upaya tersebut bertujuan untuk menjamin keberlanjutan hidup dan kesejahteraan masyarakat secara merata serta menciptakan keadilan sosial di suatu daerah (Hanly Fendy D. S., 2019).

Pertumbuhan ekonomi sebagai evolusi kegiatan ekonomi atau proses di dalam perekonomian yang mengakibatkan masyarakat sebagai salah satu

faktor produksi juga terlibat dengan produksi barang dan jasa. Output produksi tersebut kemudian dijual di pasar lokal atau diekspor ke luar negeri, bertujuan untuk meningkatkan standar hidup dan kemakmuran masyarakat di wilayah tersebut (Sukirno, 2017).

Peningkatan ekonomi mencakup peningkatan pendapatan keseluruhan dan pendapatan per individu, dengan mempertimbangkan pertumbuhan populasi serta perubahan mendasar dalam struktur ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator kunci adalah evaluasi utama terhadap kinerja perekonomian, khususnya ketika mengkaji hasil inisiatif pembangunan ekonomi nasional atau regional. Pertumbuhan ekonomi terjadi ketika output produk dan jasa meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jelas terlihat bagaimana pembangunan ekonomi dan pertumbuhan saling berkaitan: di satu sisi, pertumbuhan mendorong pembangunan ekonomi, dan di sisi lain, pembangunan ekonomi akan berjalan lebih cepat bila ada pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan dalam konteks perekonomian mengacu pada tindakan yang dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan PDB (Produk Domestik Bruto) di tingkat nasional atau daerah (PDB). Keterlibatan aspek- aspek ini menjadi penting dalam mengevaluasi dampak positif pembangunan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang korelasi timbal balik antara ekspansi ekonomi dan pembangunan ekonomi menjadi suatu keharusan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan efektif.

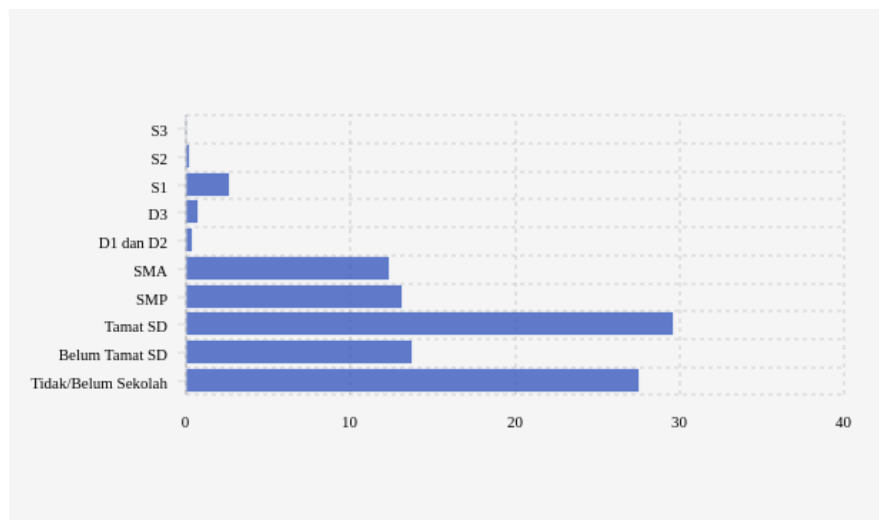
Tahun demi tahun pertumbuhan penduduk terus meningkat sehingga menimbulkan ketimpangan antara jumlah lapangan kerja yang diciptakan dan jumlah tenaga kerja. Fenomena ini menyebabkan ketidak seimbangan pasokan dan permintaan tenaga kerja yang kemudian memperparah permasalahan pengangguran. Dampak dari kelebihan penawaran tenaga kerja terhadap permintaan adalah terjadinya pengangguran, yang menjadi indikator ketidakseimbangan dalam perekonomian suatu negara. Permasalahan ini semakin memburuk seiring dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dan signifikan. Pandangan Budiarto (1985) menegaskan bahwa masalah pengangguran semakin menjadi-jadi akibat dari pertumbuhan populasi yang tidak terkendali.

Kesenjangan yang semakin besar terlihat dari peningkatan yang signifikan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah posisi kerja yang ada. Fenomena ini menjadi lebih menonjol pasca krisis ekonomi. Tidak hanya mengalami peningkatan kesenjangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan ketersediaan pekerjaan yang terbatas, tetapi juga menyaksikan lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang turut memperparah situasi tersebut. Oleh karena itu, tingkat pengangguran di Indonesia menunjukkan tren peningkatan tahunan yang signifikan (Alghofari, 2010).

Bagian krusial dalam proses reformasi ekonomi dimainkan oleh sumber daya manusia (SDM), di mana fokus utamanya adalah menciptakan SDM yang unggul dengan keterampilan tinggi serta daya saing global yang signifikan. Dalam konteks ini, dua aspek krusial terkait kondisi SDM Indonesia muncul. Pertama, terdapat ketidak seimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan peluang pekerjaan. Meskipun jumlah angkatan kerja terus meningkat, kesempatan pekerjaan tidak mengikuti laju tersebut, menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Kedua, pendidikan dasar masih menjadi mayoritas dalam struktur pendidikan, artinya angkatan kerja memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Kedua permasalahan ini mencerminkan rendahnya kualitas dan kelangkaan lapangan kerja di sejumlah sektor ekonomi di seluruh negeri.

Pengangguran merupakan permasalahan kronis yang terus-menerus menghantui sebuah negara. Ada tiga faktor yang memperkuat ketidakmampuan individu dalam mencari pekerjaan, yakni aspek budaya, pendidikan, dan kondisi pasar kerja. Faktor budaya mencakup nilai-nilai serta sikap terhadap dunia kerja, sementara pendidikan yang tidak merata dan rendahnya tingkat pendidikan di kalangan penduduk juga menjadi penyebab utama. Hal ini mempersulit penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Namun, ketidakmampuan mereka memenuhi permintaan pasar tenaga kerja juga disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM.

Gambar 1.1 Tingkat Pendidikan di Kabupaten Jember Tahun 2023 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember

Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Data kependudukan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menunjukkan, jumlah warga Kabupaten Jember, Jawa Timur mencapai 2,6 juta jiwa pada 2023. Namun, hanya 3,85% warga yang sudah mengeyam pendidikan tinggi pada Desember 2023.

Proporsi warga yang berpendidikan D1 dan D2 sejumlah 0,34% sedangkan D3 0,72%. Kemudian, warga berpendidikan S1 mencapai 2,57%, S2 0,21%, dan S3 0,019%. Selanjutnya, proporsi penduduk dengan tamatan SMA sebesar 12,29%. Lulusan SMP dan SD masing-masing 13,12% dan 29,61%. Sementara itu, ada 13,67% warga Kabupaten Jember yang belum tamat SD.

Adapun penduduk yang tidak/belum sekolah sejumlah 27,47%. Berikut ini rincian jumlah penduduk Kabupaten Jember, Jawa Timur menurut jenjang pendidikan per Desember 2023.

1. **S3**: 504 jiwa (0,019%)
2. **S2**: 5333 jiwa (0,21%)
3. **S1**: 66,77 ribu jiwa (2,57%)
4. **D3**: 18,69 ribu jiwa (0,72%)
5. **D1 dan D2**: 8732 jiwa (0,34%)
6. **SMA**: 319,55 ribu jiwa (12,29%)
7. **SMP**: 341,24 ribu jiwa (13,12%)
8. **Tamat SD**: 770,05 ribu jiwa (29,61%)
9. **Belum Tamat SD**: 355,4 ribu jiwa (13,67%)
10. **Tidak/Belum Sekolah**: 714,4 ribu jiwa (27,47%)

Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan jika sumber daya merupakan sumber daya manusia yang berkualitas, namun sebaliknya akan menjadi beban pembangunan jika kualitasnya rendah. Permasalahan tenaga kerja terdidik sebenarnya telah diantisipasi oleh lembaga pendidikan baik itu pihak sekolah maupun perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang berdaya saing tinggi. Pendidikan mempunyai hubungan yang dalam dengan sumber daya manusia, yakni pendidikan merupakan media untuk menciptakan SDM yang berkualitas karena melalui pendidikan dapat dibentuk tenaga kerja yang bermutu tinggi, mempunyai pola pikir dan cara bertindak yang modern. SDM seperti inilah yang diharap mampu menggerakkan roda pembangunan kehidupan ke depan. Pengangguran terdidik sangat berkaitan dengan masalah pendidikan di negara berkembang pada umumnya, antara lain berkisar pada masalah mutu pendidikan, kesiapan tenaga pendidik, fasilitas dan pandangan masyarakat.

Lapangan pekerjaan merupakan tolak ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan. Semakin selaras struktur tenaga kerja yang disediakan oleh system pendidikan dengan struktur lapangan kerja maka semakin efisienlah system pendidikan yang ada. Dengan demikian pengalokasian sumber daya manusia akan diserap oleh lapangan kerja. Namun fakta yang terjadi saat ini, pendidikan juga dianggap berkaitan erat dengan pengangguran, khususnya pengangguran tenaga kerja terdidik. Keadaan tersebut sejalan dengan pernyataan berikut: “Pada negara berkembang umumnya pengangguran banyak terjadi pada penduduk yang berpendidikan tinggi (SLTA ke atas). Sebaliknya pada negara maju pengangguran banyak terjadi pada mereka yang berpendidikan rendah. Semakin tinggi pendidikan orang semakin rendah tingkat penganggurannya”.

Umumnya kelompok penduduk yang berpendidikan rendah berasal dari keluarga yang berpenghasilan rendah (miskin), sehingga mereka tidak mungkin bertahan hidup tanpa ada pekerjaan/pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Umumnya jenis pekerjaan mereka tidak tetap atau merupakan kegiatan informal. Sehingga angka pengangguran terbuka pada kelompok pendidikan rendah cenderung lebih rendah. Sebaliknya mereka yang berpendidikan tinggi, umumnya berasal dari keluarga “mampu” yang dapat menggantungkan kebutuhan lainnya dari orang tua atau anggota keluarga lainnya.

Indonesia adalah bangsa yang sedang dalam pembangunan menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, termasuk dalam mengatasi masalah pengangguran. Masalah ini menjadi bagian

tak terpisahkan di antara banyak permasalahan yang dihadapi negara-negara berkembang, seperti kemiskinan dan ketidakstabilan ketenagakerjaan. Inflasi dan pengangguran merupakan dua isu utama yang kerap dihadapi oleh negara-negara yang tingkat perkembangannya masih pada tahap awal.

Banyak negara maju dan berkembang di seluruh dunia berjuang mengatasi masalah pengangguran yang rumit. Peningkatan angka pengangguran merupakan permasalahan rumit dan signifikan yang lebih berdampak pada masyarakat berpendapatan rendah dibandingkan ketimpangan distribusi pendapatan. Dinamika kehidupan masyarakat selalu menimbulkan munculnya permasalahan baru pada setiap peningkatan jumlah penduduk. Pengangguran mempunyai kemampuan untuk memperburuk kemiskinan dan menyebabkan ketidakstabilan sosial jika tidak segera diatasi (BPS, 2007). Peningkatan angka pengangguran yang cukup besar akan terjadi apabila jumlah penduduk dan tenaga kerja yang meningkat tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan yang tersedia. Menurut Bupati Jember, laju pertumbuhan ekonomi di wilayah ini telah melampaui rata-rata Jawa Timur, bahkan mencapai puncak tertinggi suatu ketika. Namun, terjadi perubahan signifikan dalam tren pertumbuhan saat ini. Jember kini dikenal sebagai pusat pendidikan yang berkembang, hal ini disebabkan oleh lingkungan yang bersahabat dan biaya hidup yang terjangkau. Selain itu, perguruan tinggi di Kabupaten Jember juga bisa bersaing dengan perguruan tinggi di kota lain. Tingginya angka pengangguran di kota ini cukup memprihatinkan mengingat Kabupaten Jember menduduki peringkat ketujuh dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur, terlihat dari tabel data Badan Pusat Statistik Jawa Timur.

Meningkatnya angka pengangguran dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu kesulitan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Jember. Terdapat 45.619 orang yang menganggur di wilayah ini pada tahun 2013 dibandingkan dengan 31.472 orang pada tahun 2010, seperti yang diilustrasikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Jember Tahun 2010-2013

Uraian	2010	2011	2012	2013
Angkatan Kerja	1 162 067	1 208 660	1 128 504	1 150 396
- Bekerja	1 130 595	1 160 941	1 084 407	1 104 777
- Pengangguran Terbuka	31 472	47 719	44 097	45 619
Bukan Angkatan Kerja	589 080	542 974	631 123	617 226
- Sekolah	93 929	120 123	111 710	112 226
- Mengurus Rumah Tangga	394 996	332 754	418 703	393 789
- Lainnya	100 155	90 097	100 710	111 211
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	1 751 147	1 751 634	1 759 627	1 767 622
TPAK	66,36	69,00	64,13	65,08
TPT	2,71	3,95	3,91	3,97

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember

Permasalahan tingkat pengangguran di Kabupaten Jember memerlukan penyelesaian yang efektif dalam konteks perekonomian lokal. Pertumbuhan populasi yang konsisten setiap tahun berkontribusi pada lebih banyak orang yang mencari pekerjaan, yang berarti lebih banyak pekerjaan yang tersedia. Pertumbuhan jumlah penduduk yang signifikan di Kabupaten Jember dapat menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran jika langkah-langkah tidak diambil untuk menciptakan kesempatan kerja yang memadai. Hal ini menempatkan pemerintah daerah pada posisi yang sulit dalam mengatasi masalah pengangguran, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dan

menciptakan lapangan kerja yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah perlu aktif terlibat dan berperan aktif dalam menemukan solusi yang efektif untuk menghadapi permasalahan ini.

Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2021-2023 (persen)

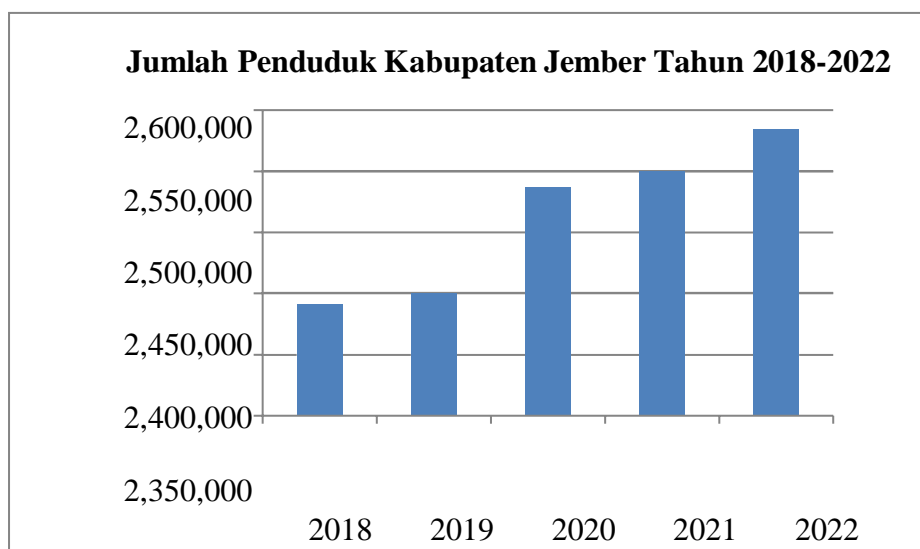
Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2021	2022	2023
Jawa Timur	5,74	5,49	4,88
Kabupaten Bangkalan	8,07	8,05	6,18
Kabupaten Banyuwangi	5,42	5,26	4,75
Kabupaten Blitar	3,66	5,45	4,91
Kabupaten Bojonegoro	4,82	4,69	4,63
Kabupaten Bondowoso	4,46	4,32	4,15
Kabupaten Gresik	8	7,84	6,82
Kabupaten Jember	5,44	4,06	4,01
Kabupaten Jombang	7,09	5,47	4,66
Kabupaten Kediri	5,15	6,83	5,79
Kabupaten Lamongan	4,90	6,05	5,46
Kabupaten Lumajang	3,51	4,97	3,67
Kabupaten Madiun	4,99	5,84	5,14
Kabupaten Magetan	3,86	4,33	4,16
Kabupaten Malang	5,40	6,57	5,70
Kabupaten Mojokerto	5,54	4,83	4,67
Kabupaten Nganjuk	4,98	4,74	4,68
Kabupaten Ngawi	4,25	2,48	2,41
Kabupaten Pacitan	2,04	3,65	1,83
Kabupaten Pamekasan	3,10	1,40	1,74
Kabupaten Pasuruan	6,03	5,91	4,84
Kabupaten Ponorogo	4,38	5,51	4,66
Kabupaten Probolinggo	4,55	3,25	3,24
Kabupaten Sampang	3,45	3,11	2,72
Kabupaten Sidoarjo	10,87	8,80	8,05
Kabupaten Situbondo	3,68	3,38	3,27
Kabupaten Sumenep	2,31	1,36	1,71
Kabupaten Trenggalek	3,53	5,37	4,52
Kabupaten Tuban	4,68	4,54	4,40
Kabupaten Tulungagung	4,91	6,65	5,65
Kota Batu	6,57	8,43	4,52
Kota Blitar	6,61	5,39	5,24

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2021	2022	2023
Kota Kediri	6,37	4,38	4,06
Kota Madiun	8,15	6,39	5,85
Kota Malang	9,65	7,66	6,80
Kota Mojokerto	6,87	5,05	4,73
Kota Pasuruan	6,23	6,18	5,64
Kota Probolinggo	6,55	4,57	4,53
Kota Surabaya	9,68	7,62	6,76

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember

Pada Tabel 1.2 bahwa jumlah penduduk Kabupaten Jember secara konsisten meningkat setiap tahunnya dari 2018 dengan jumlah 2.440.714 jiwa menjadi 2.584.233 jiwa pada tahun 2022. Pertumbuhan ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah setempat untuk terus menghasilkan peluang kerja baru guna menanggulangi potensi pengangguran. Selain itu, pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia juga perlu diprioritaskan, karena dengan peningkatan ini, akan memudahkan integrasi SDM tersebut ke dalam pasar kerja yang membutuhkan keahlian mereka.

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2018 – 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember

Indikator lain yang berdampak pada ambang kemiskinan adalah PDRB. Salah satu faktor penting yang berdampak terhadap laju pertumbuhan adalah Produk Domestik Bruto (PDRB). PDRB merupakan metrik penting untuk menilai laju pertumbuhan penduduk suatu wilayah. Seluruh kuantitas produk dan jasa yang dihasilkan selama periode waktu tertentu oleh beragam kegiatan ekonomi di suatu wilayah dikenal sebagai Produk Domestik Bruto Regional atau PDB. PDB per kapita yang ditentukan dengan membagi PDB dengan total penduduk, sering kali digunakan untuk mengukur ekspansi ekonomi. Prospek pendapatan suatu daerah meningkat seiring dengan peningkatan PDB per kapita karena meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Oleh karena itu, peningkatan PDRB per kapita dapat diartikan sebagai tanda peningkatan kesejahteraan sosial di wilayah tersebut, yang dapat membantu menurunkan proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan (Thamrin, 2001).

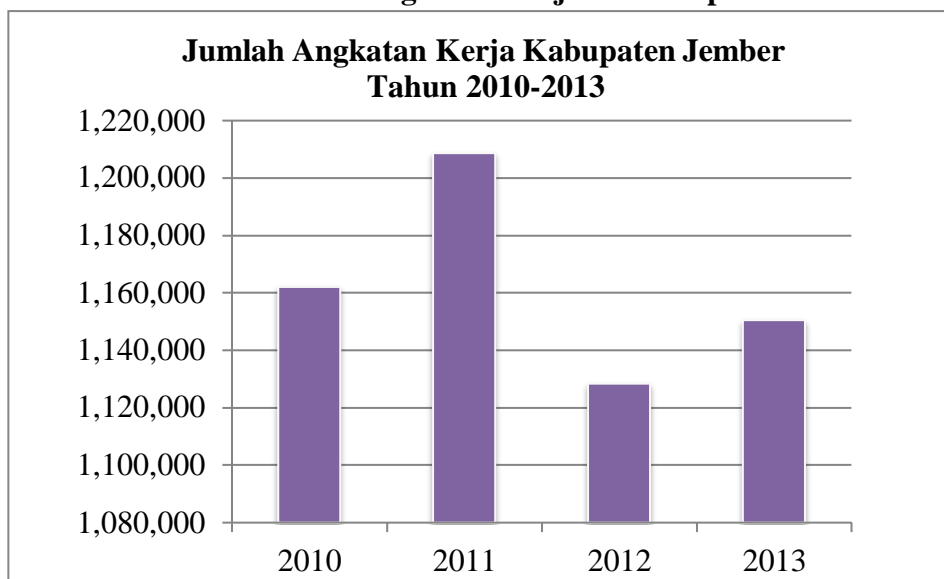
Informasi yang disajikan pada Gambar 1.3 memberikan kesimpulan bahwa tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jember terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah ini.

Gambar 1.3 PDRB Perkapita Kabupaten Jember



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember

Salah satu komponen lain yang mempengaruhi tingkat pengangguran adalah peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja. Peningkatan ini menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menangani permasalahan ini. Penting bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja seiring dengan pertumbuhan angkatan kerja agar jumlah pengangguran tidak meningkat.

Gambar 1.4 Jumlah Angkatan Kerja Di Kabupaten Jember

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember

Terlihat dari data pada Gambar 1.4 bahwa terdapat fluktuasi jumlah tenaga kerja di Kabupaten Jember antara tahun 2010 dan 2013. Pada tahun 2010, jumlah angkatan kerja mencapai 1.162.067 jiwa, sementara pada tahun 2013, angka ini turun menjadi 1.150.396 jiwa. Mengingat besarnya populasi angkatan kerja di Kabupaten Jember, penting untuk disediakan lapangan pekerjaan yang cukup untuk menampung mereka. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi potensi peningkatan tingkat pengangguran di wilayah tersebut. PDRB, partisipasi angkatan kerja, dan jumlah penduduk semuanya mempunyai pengaruh besar terhadap tingkat pengangguran, sesuai dengan konteks latar belakang yang telah disajikan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember ?
2. Apakah PDRB berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember ?
3. Apakah jumlah angkatan kerja berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan PDRB terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan gambaran singkat mengenai keadaan angka pengangguran di Kabupaten Jember.
2. Menawarkan instrumen kebijakan untuk menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Jember.
3. Sebagai data dan saran bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian tambahan mengenai topik tersebut.